

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Program Keluarga Harapan**

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup>

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi

---

<sup>18</sup> Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, (Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, 2016), hlm 10.

kemiskinan yang dihadapi berbagai negara terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>19</sup>

#### 1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM .

#### 2. Syarat Kepesertaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapandidapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita,

- a. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah),

---

<sup>19</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Program Keluarga Harapan” dalam <http://www.kemosos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 09.43 WIB.

- b. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- c. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
- d. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. Selain itu, seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaanprogram dan memenuhi kewajibannya.<sup>20</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan (PKH)

#### a. Hak Program Keluarga Harapan (PKH)

- 1) Menerima bantuan sosial.
- 2) Pendampingan sosial.
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

#### b. Kewajiban Program Keluarga Harapan (PKH)

Seluruh anggota KPM PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Edi Suharto dan Djuni Thamrin, “Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2019), hlm. 12-13.

- 1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan.
- 2) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

c. Pemenuhan Kewajiban

Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada hak kepesertaan. Peserta yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KPM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai KPM PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- 2) Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai KPM PKH.

- 3) Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses sebagai berikut:
  - a) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah KPM PKH di Kabupaten /Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
  - b) Dalam 3 (tiga) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
  - c) Kabupaten/Kota menyatakan keluar dari program.
4. Besaran Bantuan Uang Tunai Program Keluarga Harapan

Adapun Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk setiap keluarga Peserta Program Keluarga Harapan ditunjukkan oleh table berikut:

**Gambar 2.1** Skema Bantuan Per Bulan Tahun 2020

### SKEMA BANTUAN PER BULAN TAHUN 2020

NO	KATEGORI	INDEKS/ TAHUN	INDEKS/ BLN	TAMBAHAN 25%
1	BUMIL	3.000.000	250.000	3.750.000
2	AUD	3.000.000	250.000	3.750.000
3	SD	900.000	75.000	1.125.000
4	SMP	1.500.000	125.000	1.875.000
5	SMA	2.000.000	166.000	2.498.000
6	DB	2.400.000	200.000	3.000.000
7	LU	2.400.000	200.000	3.000.000

TAHAP 1	TAHAP 2	TAMBAHAN 25%			TAHAP 3			TAHAP 4		
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
750.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
750.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
225.000	225.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
375.000	375.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
500.000	500.000	166.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 900.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 3.000.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar. Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan April–Juli–Oktober. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut.
- e. Maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

- f. Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruhan anggota keluarga penerima bantuan PKH.<sup>21</sup>

## 5. Jadwal Penyaluran Bansos PKH

Adapun Jadwal Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ditunjukkan oleh table berikut :

**Gambar 2.2** Jadwal Penyaluran Bansos PKH



*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung*

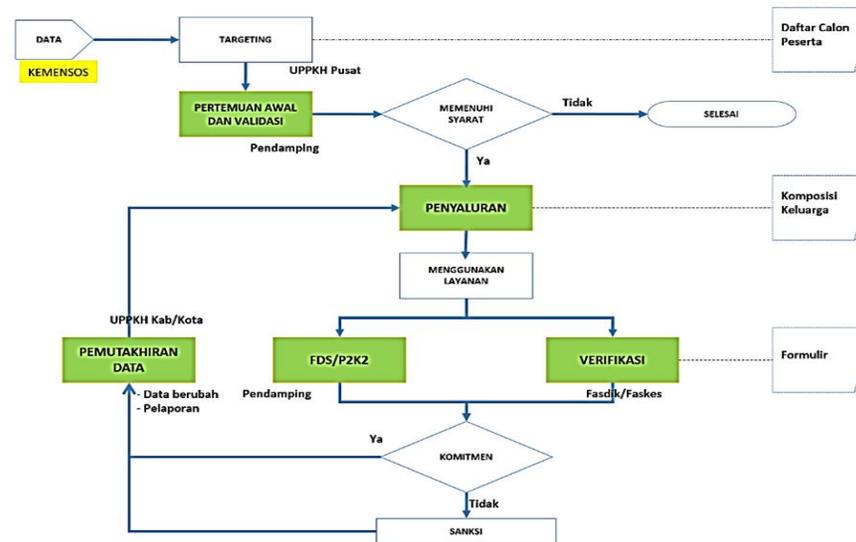
Dari skema diatas menunjukkan bagaimana proses utama pelaksanaan PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

- Penyediaan data calon Peserta PKH (bersumber dari Basis Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS).
- Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.16-19.

- c. Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon peserta PKH (Validasi).
  - d. Pembayaran dana tunai yang terdiri dari:
    - 1) Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.
    - 2) Pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
  - e. Verifikasi kepatuhan kewajiban.
  - f. Final Closing
- Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat dilihat pada skema proses utama pelaksanaan PKH sebagai berikut :

**Gambar 2.3** Alur Pelaksanaan PKH



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Dari skema di atas menunjukkan bagaimana proses utama pelaksanaan PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

- a. Penetapan sasaran (*targetting*)
- b. Persiapan daerah
- c. Pertemuan awal dan validasi
- d. Penyaluran bantuan
- e. Pembentukan kelompok kpm pkh
- f. Verifikasi komitmen
- g. Pemutakhiran data
- h. Pengaduan.

## B. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).<sup>22</sup>

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang

---

<sup>22</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 208.

bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.<sup>23</sup>

Tahapan-tahapan kesejahteraan sebagaimana teori *need* milik Abraham Maslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 8.

<sup>24</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga), hlm. 14.

Ada tiga komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera :

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik - teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk

---

<sup>25</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga,), hlm. 14.

memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola - pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi - kondisi ekonomi dan sosial.

Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-

---

<sup>26</sup> Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 27.

sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>27</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut para ahli dan beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut :

#### a. Menurut Kolle

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya .
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*....hlm., 10

b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.<sup>28</sup>

c. Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo, atau kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal mereka terbuat dari bamboo, rumbia, atau yang berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

---

<sup>28</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016.), hlm. 36.

- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi seperti sungai atau hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan dan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non

kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.<sup>29</sup>

d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu :

1) Tahap Prasejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.

2) Tahap Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

---

<sup>29</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang : Lentera Hati, 2016), hlm. 44-45.

- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik
  - d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
  - e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
  - f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
- 3) Tahap Sejahtera II

Keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut :

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.

- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
  - f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
  - h) Pasangan usia subur dengan anak dua tahun atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 sd 14) dan indikator berikut :

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  - c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  - d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv.
- 5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III dan indikator berikut :

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.<sup>30</sup>

### **C. Konsep Ekonomi Islam Dalam Mensejahterakan Masyarakat**

Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah - masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahua yaitu *Al-qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas*. Maka dari itu masyarakat akan di kendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil.

Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. norma-norma

---

<sup>30</sup> Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*,( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 12-18.

seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT. Maka dari itu umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia, dalam hal ini posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk menjadikan pedoman dasar anggota masyarakat dan masyarakat untuk tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam yang pertama yaitu wajibnya timbal balik masyarakat dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara.

Di dalam pemeritahan memiliki fungsi dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik dengan cara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam sehingga terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh, tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu: menyediakan dan menciptakan peluang peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), hlm. 6.

## 1. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Adapun Prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut :

### a) Tauhid

Merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepandaNya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

### b) ‘Adl

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzolimi dan tidak didzolimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, bila hal itu merugikan oranglain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Berdasarkan konsep ‘adl ini, Islam mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir miskin, negara bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.<sup>32</sup>

c) Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rosul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasalah segala, Allah. Fungsi rosul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut:

1) Siddiq (benar, jujur)

---

<sup>32</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), edisi revisi, cetakan IV, hal 25-26.

Tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini, muncullah sikap turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran. Karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2) Amanah (tanggungjawab, kredibilitas dan dapat dipercaya)

Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Fatonah (kecerdikan dan kebijaksanaan)

Dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kerdibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, agar tidak menjadi korban penipuan.

4) Tabligh (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran)

Merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggungjawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberi tahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi

yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat ini merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain-lain.<sup>33</sup>

d) Khilafah

Dalam Al-Qur'an bahwa Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

e) Ma'ad

Secara harfiah ma'ad berarti "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.30-31.

diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak pengusaha.

## 2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "*al-falah*" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Kesejahteraan yang dibangun al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-

psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial.<sup>34</sup>

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan - kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat adalah :

a) Kebutuhan Primer (*Ad-daruriyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan

dalam menjalani hidup didunia dan akhirat.

b) Kebutuhan Sekunder (*Al-hajjiyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

c) Kebutuhan Tersier (*At-tahsiniyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.

d) Kebutuhan Komplementer (*Al-Kamiliyyah*)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap.<sup>35</sup>

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 89.

<sup>36</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial...* hlm 2.

Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfer keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.<sup>37</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa penelitian dahulu yang sudah menggunakan tema yang sama atau hampir sama terkait Program Keluarga Harapan (PKH), berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi :

Penelitian Dedy Utomo dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 8

Purwosari, Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan sekaligus menganalisis lebih dalam terkait dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Kediri. Hasil analisis penelitian bahwa dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM di Kecamatan Purwosari yang tertuju pada bantuan Pendidikan dan kesehatan sudah benar-benar dilaksanakan dan telah mampu dalam hal mengurangi kebutuhan hidup masyarakat miskin. Hasil dari evaluasi bahwa penerima bantuan PKH mau memenuhi sekaligus melakukan komitmen karena jera sekaligus takut terhadap sanksi yang akan diberikan berdasarkan sumber data yang sudah ada. Dan anggota penerima PKH setiap tahun mengalami penurunan yaitu dari 692 pada tahun 2009 dan menurun dari tahun ketahun dan sampai tahun 2013 penerima bantuan PKH hanya 528. Secara tidak langsung pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwosari mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat yang benar-benar miskin dan sudah tepat sasaran.<sup>38</sup>

Penelitian Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Syamsuri dengan judul “Pandangan Khudsid Ahmad Terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini berupaya menjelaskan gambaran inti dari landasan filosofis

---

<sup>38</sup> Dedy Utomo, Abdul Hakim Dan Heru Ribawanto, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Rumah Tangga Miskin*, (Jurnal Administrasi Publik : Vol.02, No.01, 2019), hlm. 20-33.

pembangunan yang telah digariskan oleh Khurshid Ahmad dan memaparkan analisis dasar pandangannya mengenai sumber daya manusia dalam ekonomi pembangunan Islam. Hasil penelitian bahwa Khurshid Ahmad menjelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* dapat dilakukan melalui 4 filosofis yaitu *tauhid, rububiyyah, khalifah, tazkiyyah*. Pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pembangunan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.<sup>39</sup>

Penelitian Miftahul Huda dengan judul “Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta” . Penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang dimaksud dengan harta, bagaimana Islam mengatur sumber kepemilikan harta, dan bagaimana Islam mengatur perkembangan harta. Hasil penelitian bahwa Harta merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua manusia. Perlu diperhatikan bahwa harta itu hanyalah milik Allah dan titipan untuk manusia di muka bumi ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Islam sangat melarang pengembangan atau pengelolaan harta yang mengandung unsur riba, ihtikar, penipuan (*tadlis*), berdagang barang-barang yang haram, dan

---

<sup>39</sup>Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Syamsuri, *Pandangan Khurshid Ahmad Terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, (An – Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah : Vol. 06, No. 02, 2019), hlm. 329 - 336.

sesuatu yang bertentangan dengan akhlaq. Penyebab terlarangnya transaksi ini adalah meliputi haram zat nya, haram selain zat nya yang terdiri dari melanggar prinsip “an tarodin minkum” dan melanggar prinsip “*laa tadzlimu wa la tudzlamu*”.<sup>40</sup>

Penelitian Arif dan Yosua Horas dengan judul “Analisis Representasi Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Johor Kecamatan Medan Johor, Kota Medan”. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi respresetasi sosial para peserta PKH. Hasil analisis dalam peneilitian ini bahwa kewajiba bagi keluarga rumah tangga miskin penerima PKH terkait dalam bidang kesehatan maupun Pendidikan. Dalam implementasi PKH di Kelurahan Johor dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi : penangguhan, pemilihan peserta sekaligus menetapkan peserta yang termasuk kategori berhak menerima bantuan PKH, adanya pertemuan di awal, dan tahapan dalam pembayaran sekaligus pengaduan. Untuk implementasi di Kelurahan Johor sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Dimana proses tahapan implementasi sudah berjaan sesuai dengan prosedur sekaligus mekanisme yang terdapat pada ketentuan PKH.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Miftahul Huda, Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta, (An – Nisbah : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 05, No. 02, 2019), hlm. 41-48.

<sup>41</sup> Arif dan Yosua Horas, *Analisis Representasi Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Johor Kecamatan Medan Johor, Kota Medan*, (Skripsi : Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 12-24.

Penelitian Diyah Tri Rezeki Setyawardani dengan judul “Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui dampak dari bantuan PKH. Dalam hal ini PKH merupakan program perlindungan sosial yang dapat meringankan keluarga tidak mampu atau miskin untuk mencapai kesejahteraan. Karena tidak ada orang yang merasa dirugikan dengan adanya program ini baik masyarakat yang menerima bantuan atau tidak. Justru karena adanya program ini bisa membantu masyarakat serta meringankan beban RTSM serta dapat membantu keluarga peserta PKH dalam membiayai kesehatan ataupun pendidikan..<sup>42</sup>

Penelitian Rusydi dengan judul “Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak : Relevansi Konsep AL Kharaj Abu Yusuf Di Indonesia”. Penelitian ini akan mengkaji tentang kebijakan publik islam yang bersumber dari *al kharaj* menurut pemikiran ekonom muslim di masa daulah abasiyah yaitu abu yusuf. Masalah utama yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran *abuyûsuf* dalam pengelolaan pajak negara di zaman dinasti abasiyah. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>42</sup>Diyah Tri Rezeki Setyawardani, *Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado*, (Jurnal Holistik : Vol.13, No.2, 2020), hlm.11-12.

mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Beberapa relevansi konsep pajak Abu Yusuf dengan model pajak di Indonesia dapat disimpulkan mengenai : Tarif pajak *muqasomah* , Sistem self assessment, Dalam pengelolaan keuangan publik dan penyediaan fasilitas umum di indonesia telah melakukan penyusunan APBN dan pengelolaan BUMN untuk digunakan sebagai kesejahteraan rakyat.<sup>43</sup>

Penelitian Sunit Agus Tri Cahyono dan Siti Wahyu Iryani dengan judul “Gerak Langkah Program Keluarga Harapan : Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat” . Tujuan penelitian ini memfokuskan pada kontribusi implementasi PKH terhadap kesejahteraan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM),serta menemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat implementasi PKH. Hasil dari penelitian ini bahwa PKH memberi dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga keluarga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8 persen. Dan berdasarkan data yang sudah diteliti bantuan sosial PKH dapat mempengaruhi pola konsumsi KPM ke arah yang lebih baik. Artinya bantuan sosial PKH mampu merespon terhadap kekurangan kebutuhan konsumsi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga

---

<sup>43</sup>Syamsuri dan Ika Prastyaningsih,*Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak : Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf Di Indonesia*, (An – Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah : Vol. 05,No. 01,2018),hlm. 237-251.

KPM cenderung lebih sejahtera, meskipun terdapat variasi dalam memanfaatkan bantuan tersebut.<sup>44</sup>

Penelitian Muh.Ihsan, Wahidah Abdullah dan Bahrul Ulum Rusydi dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng”. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penimbangan sembako yang dilakukan oleh pedagang sesuai dengan perspektif Ekonomi Sslam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan para pedagang sembako sehingga merugikan para pembeli atau konsumen.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Sunit Agus Tri Cahyono dan Siti Wahyu Iryani, *Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat*, ( An – Nisbah Jurnal Ekonomi, Vol. 01, No. 04, 2017), hlm. 3-4.

<sup>45</sup>Muh.Ihsan, Wahidah Abdullah dan Bahrul Ulum Rusydi, *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng*, ( An – Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah: Vol. 05, No. 01, 2018), hlm. 381-395.

Penelitian Maya Dehani, Denny Hernawan Dan Irma Purnamasari dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N. Dunn yang menyatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu evaluasi program dapat diukur melalui enam variabel yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diluncurkan PKH yaitu dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik yang dihadapi RTSM seperti masalah gizi buruk, tingginya kematian ibu dan bayi serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Target yang dicapai dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Bogor Selatan ini berupa terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita.<sup>46</sup>

Penelitian Evi Rahmawati Dan Bagus Kisworo Dengan Judul “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui

---

<sup>46</sup> Maya Dehani, Denny Hernawan Dan Irma Purnamasari, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor*, ( Jurnal Governen p-ISSN : Vol. 04, No. 01, 2018), hlm. 47-49.

Program Keluarga Harapan”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai peran seorang pendamping dalam program PKH apakah peran pendamping tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Karena pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa peran pendamping PKH yang ada di Kecamatan Semarang Tengah telah melakukan perannya dengan baik. Peran tersebut dalam empat kategori, yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, peran dan keterampilan sebagai pendidik, peran dan keterampilan representasi /perwakilan masyarakat, serta peran dan keterampilan teknis. Akan tetapi juga ada faktor internal yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran, pendamping memerlukan waktu untuk beradaptasi, serta sulitnya kehadiran peserta PKH untuk tepat waktu. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah informasi yang sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh, dan akses jalan yang sulit terjangkau.<sup>47</sup>

---

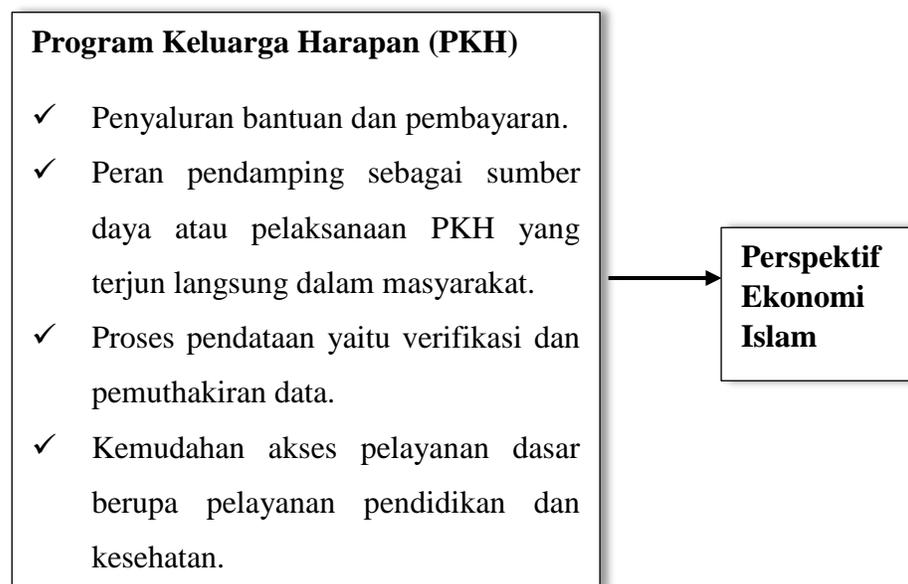
<sup>47</sup>Evi Rahmawati Dan Bagus Kisworo, *Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*, (Journal Of Nonformation Education And Community Empowerment, Vol. 01, No. 02,2017),hlm. 162-164.

Dari beberapa penelitian diatas bisa dijadikan pandangan pemikiran dan perbandingan dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Kerangka Berfikir Program Keluarga Harapan (PKH)



Keterangan :

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), manfaat bantuan yang diterima oleh penerima manfaat PKH terdiri dari beberapa item bantuan, yaitu: pemberian bantuan uang *non-tunja*. Kemudian juga menerima layanan kesehatan dan. Menerima layanan pendidikan bagi anak penerima manfaat Program Keluarga Harapan, serta menerima bantuan program kewirausahaan sekaligus ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

**Tabel 2.2** Kesejahteraan

<p><b>Kesejahteraan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal dan perlindungan.</li> <li>✓ Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan,</li> <li>✓ Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.</li> </ul>	<p><b>Perspektif Ekonomi Islam</b></p>
--	--

**Keterangan :**

Kesejahteraan yang diharapkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan antara lain bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan hidup pokok, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan serta status kesehatan. Selain itu juga yang bertujuan agar dapat meningkatkan akses, kualitas, serta taraf pendidikan sekaligus membuka potensi lapangan usaha bagi penerima PKH yang memiliki keinginan untuk mendirikan wirausaha secara mandiri sekaligus ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.